

## Analisis Determinan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Jambi

**Herbi Azhari, Yunie Rahayu, Ahmad Soleh**

*Corresponden Author:* herbiazhari@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Jambi

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan pajak daerah, PDRB dan jumlah penduduk di kota Jambi. Kedua yaitu untuk mengetahui dan menganalisis besar pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data sekunder dengan metode analisis deskriptif untuk menjawab tujuan pertama, melihat perkembangan pajak daerah, PDRB dan jumlah penduduk di kota Jambi selama periode tahun 2011-2023. Kedua untuk menganalisis pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di kota Jambi dilakukan dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda dengan bantuan alat analisis aplikasi software SPSS. Hasil analisis yang dilakukan menyimpulkan, pertama yaitu pajak daerah rata-rata sebesar 16,08 persen, PDRB rata-rata mengalami peningkatan sebesar 10,20 persen dan jumlah penduduk Jambi rata-rata meningkat persen selama periode 2010-2023. Kedua secara parsial hanya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan. Namun secara simultan PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak daerah di kota jambi, dengan nilai R-square sebesar 90,1 persen selama periode 2011-2023.

**Kata kunci:** Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pajak Daerah

*Abstract:* Aim of this research is to determine and analyze the development of regional taxes, GRDP and population in the city of Jambi. Second, to find out and analyze the influence of GRDP and population on regional tax revenues in the city of Jambi. The research method used is secondary data analysis with descriptive analysis methods to answer the first objective, looking at the development of regional taxes, GRDP and population in the city of Jambi during the 2011-2023 period. Second, to analyze the influence of GRDP and population on regional tax revenues in the city of Jambi, this was done using multiple linear regression analysis tools with the help of the SPSS software application analysis tool. The results of the analysis concluded, firstly, that the average regional tax was 16.08 percent, the average GDP increased by 10.20 percent and the average population of Jambi increased percent during the 2010-2023 period. Second, partially, only Gross Regional Domestic Product (GRDP) has a significant effect on regional tax revenues, while population has no significant effect. However, simultaneously GRDP and population have a significant and positive effect on local tax revenues in Jambi City, with an R-square value of 90.1 percent during the 2011-2023 period.

**Keywords :** Gross Regional Domestic Product, Population, Regional Tax Revenue

### Pendahuluan

Dalam kerangka administrasi pemerintahan, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menjelaskan tentang pembagian dan pembentukan wilayah kesatuan nasional negara kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri atas kabupaten dan kota. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan sosial.

Daerah mempunyai kewenangan memungut pajak dari masyarakat untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan.

Desentralisasi atau otonomi daerah berarti daerah mempunyai kekuasaan yang lebih besar dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Syarat utama otonomi daerah adalah kemandirian sektor keuangan. Pendanaan penting bagi pemerintah daerah karena tidak ada kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang bebas biaya. Dampak dari otonomi daerah adalah memberikan daerah kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk memaksimalkan potensi yang ada serta kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan tertentu. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih cerdas dalam memungut pajak dan retribusi daerah. Selain itu, Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi

Untuk mendukung terselenggaranya Otonomi Daerah yang optimal, maka diberlakukanlah kemandirian daerah yang berdasarkan pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan demikian, maka wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan menjadi semakin luas. Termasuk di dalamnya upaya-upaya untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Dengan kemandirian daerah ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya, sehingga pemerintah daerah mandiri dalam pengelolaan keuangannya dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Pemerintah daerah berusaha mendapatkan sumber daya ekonomi yang dapat digunakan karena mereka memiliki kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan semua potensi ekonomi daerah yang ada. Salah satunya adalah pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan mempertimbangkan dan mempertimbangkan kemampuan daerah untuk menerima pajak (Ayuningtyas, 2008).

Meskipun sudah dalam sistem desentralisasi, pemerintah pusat tetap bertanggung jawab untuk memberikan dana kepada daerah dengan tujuan redistribusi, atau mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Namun, Banyak daerah masih sangat bergantung pada transfer fiskal dari pemerintah pusat daripada berusaha menghasilkan uang dari sumber pemerintah daerah sendiri, Seperti yang dimaksudkan oleh desentralisasi itu sendiri.

Perkembangan ekonomi dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah yang diperoleh melalui pajak, retribusi dan penerimaan lain. Secara teori semakin tinggi kontribusi pajak Asli Daerah (PAD) dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri, maka akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Hal tersebut dapat diartikan sebagai kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan desentralisasi. Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya kecilnya PAD yang diperoleh tiap Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun

yang bersumber dari pinjaman. Instrumen keuangan daerah berupa tingkat kemandirian diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Retribusi daerah mempunyai begitu banyak jenis dibandingkan dengan pajak daerah, tetapi tidak semua retribusi berpotensi dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah secara signifikan. Perbedaan yang sangat mencolok adalah pungutan retribusi memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan atau memperoleh imbalan berupa jasa yang dapat dinikmati secara langsung. Sebaliknya pungutan pajak tidak memiliki keterkaitan atau tidak memperoleh imbalan secara langsung atas uang yang dibayarkan. Berikut ini tabel pendapatan asli daerah kota Jambi tahun 2018-2023.

**Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi Tahun 2018-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (rupiah)</b>
2018	338.890.000.000
2019	393.420.000.000
2020	355.670.000.000
2021	384.730.000.000
2022	436.890.000.000
2023	448.820.000.000

Sumber : djpk Kemenkeu RI

Berdasarkan dari data tabel 1 bahwa pada tahun 2018 pendapatan asli daerah sebesar Rp.338.89 milyar rupiah. Pada tahun 2019 pendapatan asli daerah kota Jambi mengalami penurunan menjadi Rp.393.420.000.000 rupiah. Kemudian pada tahun 2020 pendapatan asli daerah kota Jambi kembali mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.355.670.000.000 rupiah dan pada tahun 2022 pendapatan asli daerah kota Jambi mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp. 436.890.000.000 rupiah, Dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2023 yaitu, Rp. 448.820.000.000 rupiah.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak daerah di suatu daerah. (Romadhon, 2017) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Sebelumnya (Nurrohman, 2010) mendapati bahwa PDRB berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah namun inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian (Lumy et al., 2018) menunjukkan hal yang berbeda, bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (Safitri, 2018) menyatakan bahwa investasi berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan. Hal itu sejalan dengan (Akbar, 2022) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah.

Produk domestik regional bruto (PDRB), Investasi, dan Jumlah penduduk adalah beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, menurut (Batik, 2013). Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan yang

dipisahkan, Dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah digunakan untuk pembangunan daerah untuk mengembangkan potensi daerah

Salah satu untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah ukuran ekonomi yang mencakup nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah selama satu tahun. PDRB adalah indikator penting dalam menilai pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dan memiliki dampak signifikan pada PAD. Kenaikan PDRB bisa diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi dan hal ini secara positif berdampak pada PAD. Berikut ini tabel data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tahun 2018-2023

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi Tahun 2018-2023**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB ADHB Kota Jambi (rupiah)</b>
2018	28.797.410.000
2019	30.636.170.000
2020	29.465.150.000
2021	31.918.630.000
2022	36.183.840.000
2023	40.580.600.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Jambi

Pada tabel 2 dapat di jelaskan bahwa pada tahun 2018 PDRB ADHB kota jambi sebesar Rp. 28.797.410.000 rupiah, Selanjutnya pada tahun 2019 PDRB mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 30.636.170.000 rupiah, Kemudian pada tahun 2020 PDRB mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 29.465.150.000 rupiah, Kemudian pada tahun 2021 PDRB mengalami kenaikan sebesar Rp. 31.918.630.000 rupiah, Selanjutnya pada tahun 2022 mangalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 36.183.840.000 rupiah, Dan pada tahun 2023 PDRB naik menjadi Rp. 40.580.600.000 rupiah.

Ervina mengatakan bahwa jumlah penduduk dapat memengaruhi besar kecilnya pendapatan daerah. Karena jumlah penduduk yang produktif dalam perekonomian akan meningkat (Ervina, 2023). Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan jumlah penduduk sebagai elemen utama dalam meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah daerah dapat berkontribusi dengan berbagai cara, seperti menciptakan lapangan kerja, memberikan pelatihan, dan mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk yang berarti dapat berdampak positif pada PAD melalui pajak dan retribusi daerah Amaliah et al (2018). Berikut ini data tabel jumlah penduduk tahun 2018-2023.

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Jambi Tahun 2018-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk Kota Jambi (Jiwa)</b>
2018	598.100
2019	604.700
2020	606.200

2021	612.200
2022	619.600
2023	627.800

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwan pada tahun 2018 jumlah penduduk di kota jambi berjumlah 598.100 jiwa, Kemudian pada tahun 2019 jumlah penduduk naik sebesar 604.700, Dan pada tahun 2020 jumlah penduduk mengalami peningkatan yaitu sebesar 606.200 jiwa, Dan pada tahun 2021 jumlah penduduk di kota jambi masih mengalami kenaikan sebesar 612.200 jiwa, Dan kemudian pada tahun 2022 jumlah penduduk masih tetap bertambah yaitu sebesar 619.600 jiwa, Dan pada tahun 2023 jumlah penduduk naik menjadi 627.800 jiwa. Sehingga penelitian ini mengangkat judul “ Analisis Determinan Penerimaan Pajak Daerah Di kota Jambi “.

### Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait dan kemudian data tersebut dijelaskan secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

### Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data time series selama kurun waktu tahun 2011-2023. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, referensi studi kepustakaan melalui jurnal, artikel, makalah, penelitian sebelumnya, dan bahan-bahan lain.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan program aplikasi SPSS 25 dengan melakukan uji hipotesis yang terdiri dari: Uji Parsial (Uji T), Uji Simultan (Uji F) dan Koefisien Determinan ( $R^2$ ).

### Hasil dan Pembahasan

#### Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Dan Pendapatan Asli Daerah

#### Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah untuk membiayai rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan asli daerah di kota jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi Tahun 2011-2023**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi (Rupiah)	Perkembangan (%)
-------	--	------------------

2011	99.000.000.000	-
2012	113.090.000.000	14.23
2013	221.570.000.000	95.92
2014	246.420.000.000	11.22
2015	294.530.000.000	19.52
2016	287.560.000.000	-2.37
2017	397.290.000.000	38.16
2018	338.890.000.000	-14.70
2019	393.420.000.000	16.09
2020	355.670.000.000	-9.60
2021	384.730.000.000	8.17
2022	436.890.000.000	13.56
2023	448.820.000.000	2.73
	Rata-Rata	16.08

Sumber : Kemenkue RI (diolah)

Pada data tabel 5.1 di atas periode, Pajak asli daerah kota jambi pada tahun tercatat sebesar Rp. 99.000.000.000 rupiah. Data ini menjadi titik awal untuk melacak fluktuasi pendapatan selama tahun-tahun berikutnya. Terjadi lonjakan besar pada tahun 2013 dengan pertumbuhan sebesar 95.92% dari tahun sebelumnya. Dengan pendapatan mencapai 221.570.000.000 rupiah, Mencerminkan dorongan kuat dalam pengumpulan pajak asli daerah.

Pertumbuhan masih berlanjut pada tahun 2014, Meskipun pada tingkat yang lebih moderat sebesar 11.22%. Pendapatan mencapai 246.420.000.000 rupiah, Menunjukkan kelanjutan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Peningkatan yang kuat terjadi pada tahun 2015, Dengan pertumbuhan sebesar 19.53%. Pendapatan asli daerah mencapai 294.530.000.000 rupiah, Mencerminkan kesuksesan dalam strategi pengelolaan keuangan.

Tahun 2016 terjadi penurunan sebesar -2.36% dari tahun sebelumnya pada tahun 2016. Meskipun demikian, pendapatan mencapai 287.560.000.000 rupiah, Menandakan upaya untuk menjaga pendapatan daerah pada tingkat yang relatif stabil. Pada tahun 2017, Terjadi lonjakan yang signifikan dalam pendapatan asli daerah dengan pertumbuhan sebesar 38.16%. Pendapatan mencapai 397.290.000.000 rupiah, Mencerminkan kesuksesan dalam menggalang sumber pendapatan.

Pada tahun 2018, terjadi penurunan sebesar -14.70% dari tahun sebelumnya. Pendapatan mencapai 338.890.000.000 rupiah, Menunjukkan fluktuasi dalam pendapatan daerah. Pada tahun 2019, Terjadi kenaikan sebesar 16.09% dari tahun sebelumnya. Pendapatan asli daerah mencapai 393.420.000.000 rupiah, Mencerminkan pemulihan dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020, terjadi penurunan sebesar -9.60% dari tahun sebelumnya. Pendapatan mencapai 355.670.000.000 rupiah, Di akibatkan dampak dari penomena pandemi COVID-19 terhadap penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2021. Terjadi kenaikan

sebesar 8.17% dari tahun sebelumnya. Pendapatan mencapai 384.730.000.000 rupiah, menunjukkan adanya pemulihan dan upaya untuk mengembangkan pendapatan.

Tahun 2022 mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 13,56%. Pajak asli daerah mencapai 436,89 milyar rupiah, Menunjukkan pertumbuhan yang kuat pada tahun ini. Dan pada tahun 2023 pertumbuhan meningkat yaitu sebesar 2,73% dengan pajak asli daerah mencapai 448.820.000.000 rupiah.

Pejak asli daerah memiliki peran kunci dalam mendukung program pembangunan Kota Jambi. Dana yang dihasilkan dari PAD dapat dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur, layanan publik, dan proyek pembangunan lainnya. PAD adalah salah satu indikator otonomi keuangan suatu daerah. Kemampuan daerah menghasilkan pendapatan sendiri memberikan fleksibilitas dalam mengambil keputusan keuangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Meningkatkan PAD bukanlah tugas mudah. Pemerintah Kota Jambi perlu mengatasi tantangan seperti meningkatkan kepatuhan pajak, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, dan mencari sumber pendapatan baru.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Salah satu ukuran kemajuan ekonomi yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu daerah. Salah satu nya yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. PDRB mencerminkan tingkat kemakmuran ekonomi suatu daerah dan sering digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan harga konstan, di mana harga berlaku menggambarkan nilai ekonomi berdasarkan harga pasar saat ini, Sehingga memberikan gambaran lebih jelas tentang pertumbuhan ekonomi riil, Dan pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui perubahan PDRB harga konstan, Berikut ini tabel 5.2 di bawah ini :

**Tabel 5. PDRB ADHB Kota Jambi Tahun 2011-2023**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB ADHB Kota Jambi (rupiah)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
2011	12.816.110.000	-
2012	14.620.960.000	14.08
2013	16.583.950.000	13.43
2014	18.977.510.000	14.43
2015	21.293.450.000	12.20
2016	24.405.530.000	14.62
2017	26.293.310.000	7.74
2018	28.797.410.000	9.52
2019	30.636.170.000	6.39
2020	29.465.150.000	-3.82
2021	31.918.630.000	8.33
2022	36.183.840.000	13.36

2023	40.580.600.000	12.15
	Rata-Rata	10.20

Sumber : Badan Statistik Kota Jambi (diolah)

Pada tabel 5.2 di atas bahwa pada tahun 2011 tercatat PDRB kota jambi yaitu, pada tahun 2011 tercatat sebesar 12.816.110.000 rupiah. Data ini menjadi titik awal untuk melacak fluktuasi pendapatan selama tahun-tahun berikutnya. Terjadi lonjakan besar pada tahun 2012 dengan pertumbuhan sebesar 14.08% dengan pendapatan mencapai 14.620.960.000 rupiah Pertumbuhan masih berlanjut pada tahun 2013, meskipun pada tingkat yang lebih sedikit sebesar 13.43%. Pendapatan mencapai 16.583.950.000 rupiah, Menunjukkan kelanjutan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. peningkatan yang kuat terjadi pada tahun 2014, Dengan pertumbuhan sebesar 14.43%. Dengan pertumbuhan mencapai 18.977.510.000 rupiah, Mencerminkan kesuksesan dalam strategi pengelolaan keuangan.

Tahun 2015 terjadi Kenaikan sebesar 12.20% dari tahun sebelumnya pada tahun 2016. Meskipun demikian, Pertumbuhan mencapai 21.293.450.000 rupiah, menandakan upaya untuk menjaga pertumbuhan daerah pada tingkat yang relatif stabil. Pada tahun 2016, Masih terjadi kenaikan dengan pertumbuhan sebesar 14.62%. Pertumbuhan mencapai 24.405.530.000 rupiah, Mencerminkan kesuksesan dalam menggalang sumber pendapatan.

Pada tahun 2017, Terjadi kenaikan sebesar 7.74% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan mencapai 26.293.310.000 rupiah, Menunjukkan fluktuasi dalam pertumbuhan daerah. Pada tahun 2018, Terjadi kenaikan sebesar 9.52% dari tahun sebelumnya. Mencapai 28.797.410.000 rupiah, Mencerminkan pemulihan dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019, Mengalami kenaikan sebesar 6.39% dari tahun sebelumnya. PDRB mencapai 30.636.170.000 rupiah. Pada tahun 2020, Pertumbuhan mengalami penurunan akibat penomena pandemi COVID-19 sebesar -3.82% mencapai 29.465.150.000 rupiah.

Tahun 2021 mencatat pertumbuhan naik signifikan sebesar 8.33%. Pertumbuhan mencapai 31.918.630.000 rupiah, Menunjukkan pertumbuhan yang kuat pada tahun ini. Dan pada tahun 2022 pertumbuhan meningkat yaitu sebesar 13.36% dengan pertumbuhan mencapai 36.183.840.000 rupiah, Dan pada tahun 2023 pertumbuhan meningkat sebesar 12.15% dengan pendapatan 40.580.600.000 rupiah.

### **Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Jambi**

Jumlah penduduk adalah total jumlah orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu, seperti negara, provinsi, kota, atau desa, dalam periode waktu tertentu. Data ini mencerminkan jumlah individu yang tinggal secara tetap atau sementara di wilayah tersebut. Jumlah penduduk biasanya dihitung melalui sensus atau survei penduduk yang dilakukan oleh badan statistik, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. Berikut tabel data 5.3 dibawah ini:

**Tabel 6. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Jambi Tahun 2011-2023**

Tahun	Jumlah Penduduk kota Jambi (Jiwa)	Perkembangan (%)
2011	543.200	-

2012	551.700	1.56
2013	560.200	1.54
2014	568.000	1.39
2015	576.600	1.51
2016	583.400	1.18
2017	591.100	1.32
2018	598.100	1.18
2019	604.700	1.10
2020	606.200	0.25
2021	612.200	0.99
2022	619.600	1.21
2023	627.800	1.32
Rata-Rata		1.21

Sumber : Badan Statistik Kota Jambi (diolah)

Pada tabel 5.3 di atas bahwa pada tahun 2011 tercatat jumlah penduduk pada saat itu mencapai 543.200 jiwa, Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Jambi dari tahun 2011 hingga 2023 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 1.21% pertumbuhan jumlah penduduk paling terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,25% sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 1,56%. Meningkatnya jumlah penduduk di kota Jambi dari tahun ke tahun.

### Analisis Linier Berganda

Hasil perhitungan regresi linier berganda dengan program SPSS 25 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 7. Uji Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-16.387	8.595		-1.907	.086
	PDRB (X1)	3.378	1.227	2.484	2.753	.020
	Jumlah Penduduk (X2)	-1.231	.000	-1.561	-1.729	.114
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah (Y)						

Sumber : Data Olah SPSS

Pada bagian “Coefficients” dari tabel diatas, terdapat penjelasan mengenai persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini. Rumus persamaan regresi linear berganda dalam konteks penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

$$\text{Log}Y = \alpha + b_1\text{log}X_1 + b_2\text{log}X_2 + e$$

$$Y = -16,387 + 2,753x_1 - 1,729x_2 + e$$

Pembahasan :

Dari persamaan regresi linear berganda, maka dapat diinterpretasikan dalam pembahasan dan hasil sebagai berikut :

Ketika variabel X1 (PDRB), variabel X2 (Jumlah Penduduk) dianggap tidak ada/nol/konstan maka penerimaan pajak daerah di kota Jambi mengalami penurunan sebesar -16,837%. Jika variabel (X1) sebesar 2.753 dan tanda positif menunjukkan bahwa di setiap terjadi peningkatan PDRB setiap 1 tahun maka penerimaan pajak daerah di Kota Jambi periode 2011 – 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,753%. Jika Variabel (X2) sebesar -1,729, Artinya apabila terjadi kenaikan atau penurunan 1 ribu penduduk, Maka akan Menurunkan penerimaan pajak daerah (Y) Sebesar -1,729%.

**Uji T (Parsial)**

**Tabel 8. Tabel Uji T (Parsial)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standard	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-16.387	8.595		-1.907	.086
	PDRB (X1)	3.378	1.227	2.484	2.753	.020
	Jumlah Penduduk (X2)	-1.231	.000	-1.561	-1.729	.114

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah (Y)

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Hasil uji T dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Nilai t-tabel ( $df = N-K-1 = 12-2-1 = 9$ ) t-tabel = 1,83311 Pembahasan :

Nilai t tabel = 1,83311

Nilai X1 (PDRB) diketahui nilai t hitung X1 sebesar 2,753 dan nilai t tabel yaitu 1,83311 jika kita bandingkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,753 > 1,83311$ ) yang berarti secara parsial terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel X1 (PDRB) terhadap Y (Penerimaan Pajak Daerah) di Kota Jambi tahun 2011-2023 yaitu hipotesis diterima.

Nilai X2 (Jumlah Penduduk) diketahui nilai t hitung X2 sebesar -1,729 dan nilai t tabel yaitu 1,83311 jika kita bandingkan nilai t tabel ( $-1,729 < 1,83311$ ) yang berarti secara parsial terdapat hubungan negatif dan tidak signifikan antara variabel X2 (Jumlah Penduduk)

terhadap Variabel Y (Penerimaan Pajak Daerah) di Kota Jambi tahun 2011-2023 yaitu hipotesis ditolak.

### Uji F (Simultad)

**Tabel 8. Tabel Uji F ( Simultad)**

ANOVAa						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regressi on	.478	2	.239	45.307	.000b
	Residua	.053	10	.005		
	Total	.531	12			
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah (Y)						
b. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk (X2), PDRB (X1)						

Sumber : Hasil Olah SPS

Nilai f tabel ( $df=N-K-1=12-2-1=9$ ) f tabel = 5.12

Berdasarkan tabel di atas, Nilai F hitung sebesar 45,307 dan nilai F tabel yang di dapatkan yaitu 5.12 jika kita bandingkan nilai f hitung lebih besar dari f tabel ( $45,307 > 5,12$ ) yang berarti bahwa secara bersama –sama terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel X1 (PDRB), X2 (Jumlah Penduduk) terhadap variabel Y (Penerimaan Pajak Daerah) di Kota Jambi tahun 2011-2023 yaitu hipotesis diterima.

### Koefisien Determinan R2

**Tabel 9. Koefisien R2**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.949a	.901	.881	.07263
a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk (X2), PDRB (X1)				

Sumber : Hasil Olah SPSS

Dari hasil perhitungan R square yang di tunjukan pada persamaan di atas di peroleh nilai determinan sebesar 0,901 atau 90,1% yang berarti bahwa variabel X1 (PDRB), X2 (Jumlah Penduduk) yang mampu memberikan kontribusi terhadap variabel Y (Penerimaan Pajak Daerah) di Kota Jambi tahun 2011-2023 sebesar 92.4% sedangkan sisanya  $100-90,1\% = 9,9\%$  yang dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke persamaan regresi dalam penelitian ini.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis deskriptif serta kuantitatif maka, diperoleh beberapa kesimpulan, yakni: 1) Rata-rata pertumbuhan pajak daerah di kota Jambi selama periode tahun 2011 hingga 2023 dengan pertumbuhan sebesar 16,08%. 2) periode yang sama pada tahun 2011 hingga 2023 rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan rata-rata pertumbuhannya 10,20%. 3) Periode yang sama pada tahun 2011 hingga 2023 rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk dengan pertumbuhan sebesar 1,21%.

Selanjutnya saran yang bisa diberikan, yakni: 1) Dalam proses meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, pemerintah kota Jambi memiliki peran yang sangat penting. Agar penerimaan pajak daerah dapat berjalan dengan stabil dan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin, pemerintah kota Jambi harus dapat mencapai kesejahteraan populasi dan pertumbuhan ekonomi secara efektif disetiap wilayahnya. Salah satunya PDRB adalah komponen penting dalam meningkatkan sumber pendapatan pajak daerah, yang akan berdampak dan memengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak daerah di suatu daerah atau negara. 2) Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan pajak daerah dan ingin melakukan penelitian lebih lanjut, mampu dapat menambahkan variabel dan menyempurnakan segala kekurangan yang terdapat pada penelitian ini, sehingga menghasilkan penelitian baru yang lebih kompleks dan menyeluruh.

#### **Daftar Pustaka**

- Akbar, D. B. M. (2022). Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Investasi dan Belanja Modal Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Ayuningtyas, A. (2008). Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Anggaran Belanja Daerah: Studi kasus pada seluruh kabupaten di Propinsi Jawa Tengah.
- Batik, K. (2013). Analisis pengaruh investasi, PDRB, jumlah penduduk, penerimaan pembangunan, dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat.
- Ervina, N. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di kota jambi (Doctoral dissertation, Magister ilmu ekonomi).
- Lumy, D. G., Kindangen, P., & Engka, D. S. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol.19, No.2.
- Nurrohman, A. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surakarta (Tahun 1994-2007). Surakarta: Fakultas .
- Romadhon, M. S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi DKI Jakarta Tahun

Safitri, R. A. (2018). Pengaruh PDRB, Investasi, Inflasi, Jumlah Penduduk, dan Implementasi Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

<https://www.bps.go.id/id>